

Rumah Warga di Kab. Bandung Rusak Akibat Gempa Sukabumi

BANDUNG (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat satu rumah di Kabupaten Bandung mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang bersumber dari pantai selatan Sukabumi, Rabu (16/3).

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat di Bandung, Rabu mengatakan satu rumah itu berlokasi di Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. "Satu unit rumah rusak sedang, rumah yang dihuni enam jiwa. Namun demikian tidak ada korban jiwa akibat gempa tadi pagi," kata Hadi.

Sejauh ini, menurut dia BPBD baru menerima satu laporan tersebut terkait dampak kerusakan yang dialami akibat gempa.

Selain itu, BPBD Jawa Barat juga menurut dia berkoordinasi dengan BPBD Kota Sukabumi untuk melakukan pengecekan terkait total kerusakan yang timbul akibat gempa bumi.

Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa yang terjadi pada pukul 10.00 WIB yang berkekuatan 5,5 magnitudo itu terasa di berbagai wilayah di Jawa Barat, Banten, hingga Jakarta.

Berdasarkan rilis BMKG, getaran gempa yang paling dirasakan oleh masyarakat yakni di kawasan Pelabuhan Ratu hingga Cianjur.

Kemudian gempa susulan juga sempat terjadi pada pukul 11.06 WIB yang berkekuatan 4,2 magnitudo. Titik gempa tersebut masih berada pada lokasi yang berdekatan. ● pur

20 Kecamatan di Kab. Bandung Diminta Waspada Banjir

BANDUNG (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, meminta warga di 20 kecamatan yang rawan banjir mewaspada kemungkinan terjadinya bencana alam itu, terutama saat cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji di Bandung, Rabu (16/3), mengatakan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut.

"Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembaban, dan temperatur," kata dia.

Selain kerawanan banjir di 20 kecamatan, katanya, ada juga bencana lainnya yang berpotensi melanda daerah setempat, seperti longsor dan banjir bandang. Ia mencatat 24 kecamatan rawan longsor dan 13 kecamatan rawan banjir bandang.

Maka dari itu, ia menekankan kepada semua aparat kewilayahan di 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung untuk bersiaga mengantisipasi bencana hidrometeorologi. "Seperti angin kencang, banjir, dan longsor. Terutama bagi wilayah yang rawan bencana," katanya.

Selain aparat wilayah, katanya, semua pihak termasuk masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang bisa datang tiba-tiba. "Kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mengurangi risiko bencana dengan mengurangi risiko bencana," katanya.

Dalam sepekan terakhir, tercatat dua warga yang menjadi korban tewas akibat bencana di Kabupaten Bandung. Mereka meliputi satu warga Rancaekek yang tewas akibat terbawa arus banjir dan satu warga Nagreg yang tewas tertimbun longsor. ● pur

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



JALAN NASIONAL BANDUNG CIREBON AMBLAS

Petugas mengoperasikan alat berat saat perbaikan jalan amblas jalur Bandung-Cirebon di Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (16/3). Tingginya intensitas hujan serta labilnya tanah di kawasan tersebut membuat jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung dan Cirebon amblas sekitar satu meter dengan panjang 60 meter.

Pemkot Bogor Dorong Bulog Kendalikan Harga Pangan yang Terus Naik

Kepala Dinas koperasi UMKM Perdagangan dan industri Kota, Ganjar Gunawan

menyampaikan, pada momen mendekati

ibadah bulan suci Ramadan setiap tahun

memang tidak heran ditemukan gejala

harga, meskipun berbeda kasus. Pemkot

Bogor juga telah mengajukan bantuan minyak

goreng sesuai HET kepada Pemprov Jabar

untuk melaksanakan operasi pasar murah.

toh harga pangan yang sering naik ialah harga daging sapi seperti saat ini yang bertahan Rp 135.000 selama dua pekan, setelah naik sekitar 10.000 hingga Rp 15.000 dari harga sebelumnya antara Rp 115 ribu hingga Rp 125 ribu.

Kemudian harga cabai keriting, besar, dan rawit yang naik turun dengan kisaran Rp 10.000 hingga Rp 5.000 antara Rp 45 ribu hingga Rp 60 ribu menjadi Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu dan beberapa lainnya. Namun di sisi lain tahun ini, terjadi lonjakan harga yang bersifat kasustik yakni kenaikan harga kedelai yang memicu kenaikan harga tempe dan tahu. Selain itu, terjadi kenaikan harga bahan baku minyak atau crude palm oil (CPO) kelapa sawit sehingga berpengaruh terhadap harga minyak goreng.

Dalam hal pengendalian harga minyak goreng pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

busi untuk sampai ke pedagang di pasar. Upaya untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkot Bogor telah mengajukan bantuan minyak goreng sesuai HET kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan operasi pasar murah (OPM).

"Tapi kita belum diberi, mungkin nanti akan dipertimbangkan," kata Ganjar. ● gio

DPRD Bogor Dukung Penambahan Sekolah SMP dan SMA

BOGOR (IM) - Komisi IV DPRD Kota Bogor mendukung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk menambah unit sekolah tingkat SMP dan SMA. Hal itu berdasarkan kebutuhan wilayah yang memang belum ada sekolah negeri tingkat SMP maupun SMA.

Selain itu komisi IV DPRD Kota Bogor akan mendukung perluasan sekolah terbuka, agar bisa meningkatkan taraf pendidikan di Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, wacana penambahan unit sekolah tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor, sesuai dengan yang diamanatkan di perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

Beberapa skenario pembangunan unit sekolah baru sudah disiapkan oleh Disdik Kota Bogor, yaitu akan dilakukannya merger dua sekolah dasar.

"Hal tersebut merupakan jawaban dari minimnya anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan baru untuk pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor. Nah nanti salah satu bangunannya akan dibangun untuk sekolah baru tingkat SMP dan SMA sesuai kebutuhan di wilayahnya," ungkap Karnain kepada wartawan pada Rabu (16/3).

Karnain melanjutkan, sedangkan untuk progres pembangunan sekolah satu atap

dua kontraktor besar kena semprit

Bima Arya: Proyek Rel Ganda Bikin Rusak Jalan

BOGOR (IM) - Wali Kota Bogor, Bima Arya (sidak) ke jalan rusak akibat terdampak proyek rel ganda (double track) Bogor - Sukabumi di kawasan Stasiun Batutulis, Bogor Selatan, kemarin.

Sidak tersebut dilakukan Bima Arya atas banyaknya aspirasi masyarakat yang sering melintasi jalan tersebut. Selain jalan rusak, warga juga menginginkan agar ada akses Jemberan Penyeberangan Orang (JPO) untuk mobilisasi warga.

"Banyak sekali keluhan dari warga yang mengakses jalan Cipaku setiap hari, jalannya rusak dan macet. Sebetulnya ini sudah sejak akhir tahun lalu. Makanya kemudian Pemkot Bogor menyurati pelaksana melalui Balai Teknik Perkotaan Wilayah Jawa Barat pada Oktober 2021 untuk memperhatikan perbaikan jalan ini," ungkap Bima Arya.

Selain Jalan Cipaku, ada juga titik jalan lainnya yang mengalami kerusakan akibat proyek tersebut, yakni Jalan Dreded, Jalan Layungsari, Jalan Empang, Jalan Pahlawan dan Jalan Gunung Gadung.

Sementara untuk JPO di RW 08 dan RW 09 Kelurahan Batutulis, RW 03 dan RW 17

kelurahan Cipaku serta RW 05 Kelurahan Genteng. "Desember 2021 ada kesepakatan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Bogor Selatan. Ada kesepakatan untuk memperbaiki tidak hanya tambal sulam, tapi juga permanen. Sampai hari ini kami belum melihat itu," ujar Bima.

"Langkah kami, akan kembali menyurati dengan mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan ini. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Adhi Karya dan Nindya Karya (pelaksana proyek). Salah satu poinnya adalah tanggung jawab perbaikan bersifat permanen, dan akan dimulai pekerjaannya menjelang atau sebelum berakhirnya masa kontrak ketiga, sebelum berakhir kontrak keempat. Ini akan kami lampirkan juga kesepakatan ini," jelasnya.

Bima Arya juga meminta laporan progres proyek ini, karena yang dijanjikan seharusnya Februari akhir atau awal Maret 2022 ini sudah selesai. "Kita ingin berkoordinasi. Apalagi jika 28 Maret itu akan ujicoba (single track) seharusnya diiringi dengan sosialisasi dan komitmen awal, infrastruktur penunjang ini seperti jalan rusak harus diperbaiki dulu serta JPO untuk akses warga," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai mengendalikan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2022 yang kini mulai merangkak naik di daerahnya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota, Ganjar Gunawan mengatakan, kenaikan harga pangan saat ini terjadi karena dua faktor.

"Pertama karena jelang Ramadan dan Idul Fitri, dan kedua karena kasustik," kata Ganjar usai rapat koordinasi bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugianto dan staf lainnya di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3).

Ganjar menyampaikan, pada momen mendekati ibadah bulan suci Ramadan setiap tahun memang tidak heran ditemukan gejala harga, meskipun berbeda kasus. Pemkot Bogor juga telah mengajukan bantuan minyak goreng sesuai HET kepada Pemprov Jabar untuk melaksanakan operasi pasar murah.

toh harga pangan yang sering naik ialah harga daging sapi seperti saat ini yang bertahan Rp 135.000 selama dua pekan, setelah naik sekitar 10.000 hingga Rp 15.000 dari harga sebelumnya antara Rp 115 ribu hingga Rp 125 ribu.

Kemudian harga cabai keriting, besar, dan rawit yang naik turun dengan kisaran Rp 10.000 hingga Rp 5.000 antara Rp 45 ribu hingga Rp 60 ribu menjadi Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu dan beberapa lainnya. Namun di sisi lain tahun ini, terjadi lonjakan harga yang bersifat kasustik yakni kenaikan harga kedelai yang memicu kenaikan harga tempe dan tahu. Selain itu, terjadi kenaikan harga bahan baku minyak atau crude palm oil (CPO) kelapa sawit sehingga berpengaruh terhadap harga minyak goreng.

Dalam hal pengendalian harga minyak goreng pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Meskipun kini realisasinya mengalami kendala distribusi

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.

"Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. ● gio

Desamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.



IDN/ANTARA

MUSEUM WR SOEPRATMAN KEMBALI DIBUKA

Pengunjung mengamati koleksi yang dipajang di Museum WR Soepratman di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/3). Museum yang merupakan bekas rumah WR Soepratman itu kembali dibuka seiring menurunnya kasus COVID-19 di Surabaya dan mulai ramai dikunjungi pelajar menjelang hari lahir WR Supratman pada 19 Maret.

Bupati Bogor Ade Yasin Minta WP Sampaikan SPT Tahunan

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin meminta kepada seluruh Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Bogor agar segera menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun 2021 dan membayar pajak terutang paling lambat tanggal 31 Maret 2022.

Menurutnya, pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Ade Yasin pada acara Pekan Panutan SPT Tahunan dan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (15/3).

Hadir pada acara tersebut, Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, Muhammad Ismriansyah M. Zain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, perwakilan Forkopinda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, serta para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menjelaskan, saat ini pelaporan SPT sangat mudah, bisa dilakukan secara online melalui laman website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya fasilitas E-Filing pada DJP Online,

kita tidak perlu repot datang langsung ke kantor pajak. Pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

"Saya dan jajaran Forkopinda sudah memenuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT tahunan secara online. Selanjutnya kita mengimbau kepada para wajib pajak untuk segera mengisi SPT tahunan agar tidak terlambat dan tidak kena denda. Para pemimpin di setiap perusahaan, lembaga, perangkat daerah, agar memberikan contoh yang kemudian bisa dijadikan panutan bagi staffnya," terang Ade.

Ade menambahkan, untuk ketepatan pajak di Kabupaten Bogor sendiri cukup bagus. Berdasarkan data dari Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat III, sekitar 85% masyarakat sudah taat dan melaporkan SPT-nya, sisanya barangkali baru sosialisasi saat ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, bahkan bisa mencapai lebih dari 90%.

Selain melaporkan SPT tahunan, lanjut Ade, mari kita manfaatkan juga Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

"Kalau diartikan, sama dengan tax amnesty. Hanya ini lebih kecil, hanya 8% tarifnya untuk dalam negeri, tapi bagi yang luar negeri ada 11%," kata Bupati Bogor, Ade Yasin. ● gio



IDN/ANTARA

OPERASI PASAR MINYAK GORENG BAGI PEDAGANG

Sejumlah pedagang mengantre saat operasi pasar minyak goreng curah di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (16/3). Minyak goreng curah yang dijual kepada para pedagang dengan harga Rp10.500 per liter untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp11.500 per liter itu sebagai upaya menstabilkan lonjakan harga minyak goreng.